

Kendala Program Jaring Pengaman Sosial dalam Mendukung Kelangsungan Proses Belajar Mengajar Anak-anak Keluarga Miskin Tingkat SLTP di Perkotaan Jawa Timur

**Khusnul Ashar, Sasongko, Arief Hoetoro
Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya**

ABSTRAK

Pendidikan merupakan wahana utama untuk terjadinya mobilitas vertikal menuju kehidupan yang lebih baik. Secara lebih spesifik, diyakini bahwa pendidikan merupakan jalan untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. Dicetuskannya Program Wajib Belajar Sembilan Tahun pada tahun 1994 jelas berangkat dari suatu keputusan yang dilandasi oleh keyakinan semacam itu.

Di Jawa Timur pencapaian target tuntas belajar sembilan tahun khususnya pada jenjang SLTP nampaknya juga masih belum memenuhi harapan. Pada tahun 2004 masih terdapat 14,7 % anak-anak usia 13-15 tahun yang tidak bersekolah. Secara total angka partisipasi sekolah anak usia 13-15 tahun di Jawa Timur masih 84,6 % bahkan di Kabupaten Sampang Madura angka partisipasinya hanya 63,6 % (BPS, 2004).

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi mengenai faktor-faktor apa yang menjadi kendala masyarakat dalam berpartisipasi terhadap program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun di perkotaan Jawa Timur.

Hasil penelitian dengan pendekatan makro regional menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan merupakan faktor yang berpengaruh nyata terhadap partisipasi tingkat SLTP. Hasil analisis mikro keluarga diperoleh temuan bahwa tingkat pendidikan orang tua, tingkat penghasilan orang tua dan total biaya sekolah anak mempunyai pengaruh nyata dimana variabel tingkat pendidikan orang tua mempunyai pengaruh yang paling besar. Dari aspek budaya, terdapat perbedaan yang nyata antara minat responden berbudaya Mataraman (Jawa) dengan responden berbudaya Madura dalam menyekolahkan anak ke jenjang SLTP dimana suku Jawa cenderung mempunyai minat yang lebih tinggi.

Kata kunci : Partisipasi; Ekonomi; Budaya

ABSTRACT

ANALYSIS OF ECONOMIC AND CULTURE FACTORS THAT INFLUENCE PARTICIPATION TO THE NINE YEAR SCHOOL COMPULSORY PROGRAM IN EAST JAVA

Education is the main road to vertical mobility that is to reach the higher level of nation welfare. Specifically, it is believed that the education is the main tool to alliviate

poverty. The emerge of the Nine Year Education Compulsory Program which launched at 1994 is parrarell to that problems.

In East Java province the achievement of that program particularly for the junior high school level is still low. Int the year of 2004 in the province still consist of 14,7 % children in the age of 13-15 year not attented the school. Totally, enrolment rate for children in the age of 13-15 in East Java was 84,5 % in 2004. Even in Sampang region of Madura island the enrolment rate was only 83,6 %.

The aims of this study are to gain an information of the factors that affect the participation of the people to the Nine Year Education Compulsory Program in East Java.

The finding suggested that by using the macro approach, poverty is the factor that significantly related to the level of the enrolment rate of the junior high school level. Using the micro approach, this study found that the parrent (father) education, parent level of income, and total cost of children school have significantly affect the school participation to the Nine Year Education Compulsory Program in East Java. This study also found that the culture variable tends to have correlation to that level enrolment rate which is the people with Javanese culture tend to has the higher participation than people with Madurenes culture.

Keywords : Participation; Economy; Culture.

PENDAHULUAN

Dilihat secara makro nasional maupun mikro rumah tangga pendidikan memainkan peranan penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Di tingkat makro, pendidikan dipandang sebagai unsur utama pembentukan kualitas SDM yang peranannya dalam pembangunan ekonomi dirasakan semakin besar. Ditingkat mikro, peranan pendidikan sebagai pemicu teknologi dan produktivitas dalam meningkatkan kesejahteraan tidak bisa diragukan. Studi Lau *et al* (1992) di Brazil menunjukkan bahwa pertumbuhan out put selama periode 1970-1980, 40 % disebabkan oleh faktor teknologi. Disamping itu studi Bank Dunia tahun 1993 terhadap negara-negara Asia Timur seperti Jepang dan empat macan Asia (Singapura, Hong Kong, Taiwan dan Korea Selatan) menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 1960-1990 laju pertumbuhan produktivitas total faktor (PTF) mencapai 3,0 % per tahun sedangkan untuk negara-negara Amerika Latin pada periode tersebut laju pertumbuhan PTFnya hanya 0,1 % (World Bank, 1993). Dengan demikian jelas bahwa peningkatan pendidikan merupakan wahana utama untuk terjadinya mobilitas vertikal menuju kehidupan yang lebih baik. Secara lebih spesifik, diyakini bahwa pendidikan merupakan jalan bagi penduduk untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. Dicetuskannya Program Wajib Belajar Sembilan Tahun pada tahun 1994 jelas berangkat dari suatu keputusan yang dilandasi oleh keyakinan semacam itu.

Dilihat dari masa sekolah selama sembilan tahun, maka tingkat partisipasi sekolah pada jenjang SD dan SLTP atau angka partisipasi sekolah bagi penduduk usia 7-12 tahun dan usia 13-15 tahun merupakan salah satu indikator yang memadai untuk menilai tingkat keberhasilan program. Secara umum, target pencapaian untuk sekolah dasar sudah menunjukkan hasil yang menggembirakan namun untuk jenjang SLTP nampaknya masih banyak yang harus dikerjakan.

Di Jawa Timur pencapaian target tuntas belajar sembilan tahun khususnya pada jenjang SLTP nampaknya juga masih belum memenuhi harapan. Setelah duapuluh tahun program tersebut dicanangkan, masih terdapat sejumlah anak usia 13-15 tahun yang tidak bisa melanjutkan pendidikannya. Walaupun tingkat partisipasi sekolah untuk anak usia 7-12 tahun sudah menunjukkan indikator yang cukup baik (97,4 %), namun pada tahun 2004 masih terdapat 14,7 % anak-anak usia 13-15 tahun yang tidak bersekolah. Secara total angka partisipasi sekolah anak usia 13-15 tahun di Jawa Timur masih 84,6 % bahkan di Kabupaten Sampang angka partisipasinya hanya 63,6 % (BPS, 2004).

Studi empirik dengan landasan teori modal manusia (*Human Capital theory*) membuktikan bahwa kenaikan biaya pendidikan berdampak negatif terhadap *enrollment*, khususnya bagi mereka yang berada pada strata pendapatan rendah (Priyono, 1998). Asumsi dasar dari teori modal manusia adalah suatu anggapan bahwa bersekolah adalah melakukan investasi berupa pengorbanan sejumlah biaya untuk memperoleh imbalan berupa peningkatan penghasilan diwaktu yang akan datang (Becker 1964; 1975). Dari perspektif ini nampak bahwa faktor ekonomi merupakan faktor dominan dalam mempengaruhi tingkat partisipasi sekolah.

Namun demikian, hubungan antara tingkat penghasilan dengan tingkat partisipasi sekolah nampak tidak selalu linier di Jawa Timur. Suatu contoh, Kabupaten Sampang dengan tingkat partisipasi sekolah untuk penduduk usia 13-15 tahun yang paling rendah di Jawa Timur, namun angka kemiskinan di daerah ini hanya 39,3 %, jauh lebih rendah daripada Kabupaten Bondowoso yang angka kemiskinannya mencapai 51,0 % dengan tingkat partisipasi sekolah yang lebih tinggi (BPS Jatim, 2004).

Disamping faktor ekonomi, peranan budaya dan dukungan pemerintah merupakan faktor lain yang cukup penting. Sarana-prasarana pendidikan merupakan faktor pendukung keberhasilan sektor pendidikan dimana saja. Peranan dan perhatian pemerintah baik pusat maupun daerah sangat menentukan ketersediaan gedung sekolah, guru dan prasarana pendukungnya. Peraturan daerah dan insentif untuk kesejahteraan pengelola pendidikan adalah faktor penting yang sangat ditentukan oleh peranan pemerintah daerah. Perhatian pemerintah daerah yang sangat besar pada sektor pendidikan di beberapa daerah seperti Kabupaten Tanah Datar di Sumatera Barat, Kabupaten Bantul di Yogyakarta dan Kabupaten Singaraja di Bali merupakan faktor dominan dalam meningkatkan partisipasi sekolah anak didik.

Namun demikian, walaupun faktor ekonomi, budaya dan peranan pemerintah sangat penting dalam menunjang pendidikan dasar di daerah, masih belum banyak penelitian di Indonesia yang secara khusus menganalisis faktor-faktor tersebut pada tingkat propinsi dan pada tingkat Kabupaten/Kota. Studi-studi yang ada kebanyakan berupa studi kasus pada cakupan wilayah yang lebih kecil atau fokus kajiannya berskala nasional/internasional (Clark, 1983; Triaswati, 1995; Priyono, 1998;). Untuk itu diperlukan kajian komprehensif yang bisa digunakan untuk penyusunan kebijakan pencapaian target program wajib belajar sembilan tahun pada tingkat daerah Kabupaten/Kota dan Propinsi. Dalam hal ini, pertanyaan yang penting untuk diperoleh jawaban adalah bagaimanakah bentuk hubungan antara faktor ekonomi, faktor budaya dan peranan pemerintah terhadap partisipasi masyarakat dalam menyekolahkan anak? Seberapa besar peranan faktor ekonomi, faktor budaya dan faktor pemerintah dalam mempengaruhi keputusan orang tua menyekolahkan anaknya ? Diantara faktor-faktor tersebut, faktor mana yang pengaruhnya paling besar? Secara spesifik, kebijakan apa

yang bisa diintrodusir oleh pemerintah terkait dengan faktor ekonomi dan faktor budaya guna meningkatkan pemerataan dan partisipasi masyarakat terhadap program wajib belajar sembilan tahun ?

Hasil penelitian ini akan memberi kontribusi yang bermanfaat baik bagi eksekutif pemerintah daerah maupun bagi pihak legislatif DPRD. Bagi pihak eksekutif (pemerintah), dengan diketahuinya pengaruh dan peranan masing-masing faktor tersebut diatas, pemerintah bisa menyusun rencana kerja operasional yang terarah dengan skala prioritas yang jelas, yaitu bidang apa yang harus lebih didahulukan dan dengan pendekatan bagaimana agar perluasan dan pemerataan akses program bisa dicapai. Bagi pihak legislatif (DPRD), hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan penyempurnaan Peraturan Daerah (PERDA). Dengan adanya hasil kajian ini, pihak legislatif juga bisa lebih memahami kendala yang dihadapi oleh pihak eksekutif (cq. Dinas Pendidikan Daerah/Kota) dalam upaya mencapai target program wajib belajar sembilan tahun di masing-masing daerah.

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran yang jelas dan informasi yang memadai mengenai faktor-faktor apa yang berperan dalam mempengaruhi masyarakat dalam berpartisipasi terhadap program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun di Jawa Timur.

Secara khusus penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi bentuk hubungan antara faktor ekonomi, faktor budaya dan peranan pemerintah terhadap partisipasi masyarakat dalam menyekolahkan anak di tingkat SLTP,
2. Mengukur besarnya peranan faktor ekonomi, faktor budaya dan faktor pemerintah dalam mempengaruhi keputusan orang tua menyekolahkan anaknya pada tingkat SLTP. Dari pengukuran ini akan diperoleh informasi mengenai besarnya peranan masing-masing faktor yang mempengaruhi partisipasi sekolah.
3. Mengemukakan rekomendasi kebijakan yang bisa diintrodusir oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan pemerataan dan partisipasi masyarakat terhadap program wajib belajar sembilan tahun

Bagi pihak eksekutif (pemerintah), dengan diketahuinya pengaruh dan peranan masing-masing faktor tersebut diatas, pemerintah bisa menyusun rencana kerja operasional yang terarah dengan skala prioritas yang jelas, yaitu bidang apa yang harus lebih didahulukan dan dengan pendekatan bagaimana agar perluasan dan pemerataan akses program bisa dicapai. Bagi pihak legislatif (DPRD), hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan penyempurnaan Peraturan Daerah (PERDA). Dengan adanya hasil kajian ini, pihak legislatif juga bisa lebih memahami kendala yang dihadapi oleh pihak eksekutif (cq. Dinas Pendidikan Daerah/Kota) dalam upaya mencapai target program wajib belajar sembilan tahun di masing-masing daerah.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian analisis deskriptif. Analisis dilakukan melalui dua pendekatan yaitu analisis makro dengan unit analisis seluruh daerah kabupaten/kota

di Jawa Timur dan analisis mikro dengan unit analisis rumah tangga di dua wilayah budaya yaitu budaya mataraman dan budaya madura.

Daerah penelitian ditentukan secara *purposive* yaitu Propinsi Jawa Timur. Propinsi ini dipilih karena selain merupakan propinsi dengan jumlah penduduk terbesar dengan kegiatan ekonomi beragam juga karena adanya variasi budaya Jawa-Mataram dibagian tengah kearah barat daya dan budaya Madura di kawasan utara kearah timur laut . Disamping itu, pada era otonomi daerah dewasa ini, di propinsi Jawa Timur terdapat 38 Kabupaten/Kota yang peranan masing-masing pemerintah daerah terhadap sektor pendidikan cukup bervariasi intensitasnya.

Sampel wilayah yang diambil adalah Kota Malang sebagai representasi dari budaya Jawa-Mataram, serta Kota Pasuruan sebagai cerminan masyarakat Madura.

Perspektif analisis menggunakan tinjauan makro dan mikro. Analisis makro dilakukan pada unit analisis daerah Kabupaten-Kota berkenaan dengan variabel-variabel agregat Analisis mikro diterapkan untuk unit analisis rumah tangga sehubungan dengan variabel-variabel individu rumah tangga.

Untuk analisis makro, populasinya adalah seluruh daerah Kabupaten-Kota di Jawa Timur. Metode sampling yang digunakan adalah metode sensus karena seluruh daerah Kabupaten-Kota merupakan unit-unit yang dianalisis.

Untuk analisis mikro, populasinya adalah seluruh rumah tangga yang mempunyai anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Sampel dikelompokkan menurut strata ekonomi yaitu kelompok keluarga berpendapatan tinggi dan kelompok keluarga berpendapatan rendah. Dengan demikian metode sampling yang digunakan adalah metode *stratified simple sampling*. Sumber informasi mengenai tingkat ekonomi masing-masing rumah tangga berasal dari data Keluarga Sejahtera-3 (untuk katagori keluarga berpendapatan tinggi) dan Keluarga Pra-Sejahtera (untuk keluarga berpendapatan rendah) dari Kantor BKKBN setempat.

Jumlah sampel untuk keperluan penelitian ini sebesar 200 rumah tangga, dimana untuk masing-masing daerah diambil 100 rumah tangga dengan yang terbagi atas kelompok berpendapatan tinggi dan kelompok berpendapatan rendah.

Guna memenuhi tujuan penelitian, alat statistik yang digunakan adalah analisa regresi linier sederhana dengan dilakukan uji statistik.

Spesifikasi model untuk analisis makro adalah sebagai berikut :

$$Y = f (X_1, X_2, X_3, X_4, X_5, X_6, X_7)$$

Dimana ,

Y = Angka partisipasi sekolah usia 7-12 dan usia 13-15 th th 2004

X1 = PDRB per kapita atas dasar harga berlaku. Th 2004

X2 = Persentase penduduk miskin, th 2004

X3 = Rasio guru per kelas tingkat SD, tahun 2004

X4 = Rasio murid per kelas tingkat SD, tahun 2004

X5 = Laju pertumbuhan ekonomi, tahun 2004

X6 = PAD, tahun 2004

X7 = APBD, tahun 2004

Spesifikasi model untuk analisis mikro adalah sebagai berikut :

Analisa statistik terhadap model regresi terhadap data hasil penelitian dilapangan dicoba dilakukan untuk mengetahui apakah karakteristik budaya (suku Jawa dan Madura) memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kemungkinan keluarga responden menyekolahkan anak-anaknya ke tingkat SMP. Menggunakan variabel-variabel biaya sekolah anak yang meliputi besarnya iuran bulanan, sumbangan pembangunan, biaya buku, biaya peralatan, biaya baju dan sepatu, serta uang transportasi maka dibentuklah model persamaan sebagai berikut:

$$Y = f(X_1, X_2, X_3, X_4, X_5, X_6)$$

$$\text{Sehingga; } Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + b_6X_6 + e$$

Dimana; Y = kemungkinan anak disekolahkan ke tingkat SMP

X₁ = iuran bulanan

X₂ = sumbangan pembangunan

X₃ = biaya buku

X₄ = biaya peralatan

X₅ = biaya baju dan sepatu

X₆ = uang transportasi

Model regresi diatas akan digunakan untuk menghasilkan model regresi untuk masing-masing suku yakni model regresi untuk suku Jawa, model regresi untuk suku Madura, serta model regresi untuk suku Jawa + Madura, sehingga pada akhirnya nanti akan didapatkan/diketahui apakah perbedaan budaya memberikan kontribusi terhadap model. Selanjutnya, juga akan dilakukan uji terhadap model kedua untuk melihat apakah variabel total biaya anak sekolah, tingkat pendidikan responden, jumlah anak, serta besarnya pengeluaran sehari-hari berpengaruh terhadap kemungkinan anak disekolahkan ke tingkat SMP. Model regresi yang akan diuji adalah sebagai berikut:

$$Y = f(X_1, X_2, X_3, X_4)$$

$$\text{Sehingga; } Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Dimana; Y = kemungkinan anak disekolahkan ke tingkat SMP

X₁ = jumlah total biaya anak sekolah

X₂ = tingkat pendidikan responden

X₃ = jumlah anak

X₄ = besarnya pengeluaran sehari-hari

Selanjutnya, dari kedua model diatas akan dilakukan uji statistik untuk mengetahui bagaimana model yang terbentuk untuk masing-masing kelompok responden (responden suku Jawa, suku Madura, dan keduanya)

HASIL DAN PEMBAHASAN.

Berdasarkan hasil analisis dengan pendekatan makro regional, ditemukan bahwa angka partisipasi untuk tingkat SLTP di seluruh daerah kabupaten dan kota Jawa Timur dipengaruhi oleh tingkat kemiskinan. Hal ini berarti bahwa tingkat kemiskinan mempunyai pengaruh nyata terhadap kesuksesan program wajib belajar sembilan tahun pada tingkat kabupaten/kota. Dari hasil analisis dengan pendekatan mikro keluarga diperoleh temuan bahwa untuk partisipasi kejenjang SD tidak satupun variabel dalam model yang berpengaruh. Dengan demikian, keberhasilan program wajib belajar sembilan tahun ditentukan oleh keberhasilan mendorong partisipasi pada jenjang SLTP. Untuk partisipasi ke jenjang SLTP, hasil analisis menunjukkan bahwa variabel-variabel yang berpengaruh adalah tingkat pendidikan orang tua, tingkat penghasilan orang tua dan total biaya sekolah anak. Diantar tiga variabel ini, variabel tingkat Pendidikan orang tua mempunyai pengaruh yang paling besar. Suku Jawa walaupun tingkat penghasilannya relatif lebih rendah dibanding suku Madura, namun tingkat kepastian menyekolahkan anaknya ke jenjang SLTP lebih tinggi. Hal ini menyiratkan bahwa terdapat perbedaan yang nyata antara minat responden berbudaya Mataraman dengan responden berbudaya Madura dalam menyekolahkan anak ke jenjang SLTP. Namun perlu diingat bahwa tingkat pendidikan responden suku Jawa relatif lebih tinggi daripada suku Madura. Dengan demikian walaupun faktor budaya cenderung berpengaruh terhadap tingkat kesuksesan program wajib belajar sembilan tahun namun peranan dari perbedaan faktor pendidikan orang tua juga ikut mempengaruhinya.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.

Dari hasil penelitian, rekomendasi yang bisa dikemukakan bagi pemerintah daerah Jawa Timur adalah :Perlunya upaya yang sungguh-sungguh dari pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan di seluruh daerah melalui program-program padat karya, akses kredit bagi golongan ekonomi lemah, perlindungan usaha dan pengendalian harga kebutuhan barang pokok; Adanya program penyuluhan dan motivasi bagi orang tua mengenai pentingnya pendidikan tingkat SLTP bagi anak-anak khususnya untuk daerah-daerah dimana keberadaan suku Madura cukup dominan. Pada wilayah ini, program penyadaran masyarakat lebih diutamakan; Bagi daerah-daerah dengan budaya Mataraman, program-program peningkatan kemampuan ekonomi rumah tangga miskin lebih diperlukan disamping penyuluhan dan motivasi. Program-program bantuan seperti BOS tetap perlu dilaksanakan bahkan akan berpengaruh positif bila nilai dan cakupannya ditingkatkan mengingat variabel biaya sekolah anak juga ikut mempengaruhi partisipasi sekolah tingkat SLTP.

Daftar Pustaka

BPS Jawa Timur (2000), **Jawa Timur Dalam Angka tahun 2000**, Surabaya

----- (2004), **Jawa Timur Dalam Angka tahun 2004**, Surabaya

Becker, Gary, S (1964), **Human Capital : A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education**, New York: Columbia University Press

- (1975), ***Human Capital : A Theoretical Analysis***, 2nd edition, New York : National Bureau of Economic Research
- Bisry, Rony, M (1990), ***Higher Level Manpower Development in Indonesia : Rate of Return and Embodied Technical Change***, Thesis, Illinois
- Clark, D (1983), “ ***How Secondary School Graduates Perform in the Labor Market : a Study of Indonesia***”, World Bank Working paper, No. 165, Washington D.C.
- Dick, Fox Dan Mackie (1997). ***Balanced Development East Java In The New Order. Pembangunan Yang Berimbang Jawa Timur Dalam Era Orde Baru***. Jakarta: PT Gramedia.
- Hansen, Lee W. ed (1970), ***Education, Income and Human Capital***, New York: Columbia University Press
- Harbison, F.H (1962), “ ***Human Resources in Development Planning in Modernising Economies*** “, International Labour Review , Mei
- Lau, J. Lawrence, *et al* (1993), “ Education and Economic Growth, Some Cross-Sectional Evidence from Brazil”, ***Journal of Development Economics*** no. 41
- McMahon dan Budiono (ed) (1992), ***Education and the Economy : The External Efficiency of Education***, Jakarta, Pusat Informatika Balitbang Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
- Kottak, Conrad Philip (1999), ***Culture (Social Sciences)***, World Book, Inc. Chicago
- Koentjaraningrat (1990), ***Pengantar Ilmu Antropologi***, Rineksa Cipta, Jakarta
- Triaswati, Ninasapti (1995), ***An Intergenerational Life Cycle Model of Family Investment in Human Capital : A Case Study of Indonesia***, Disertasi, Universitas Illinois
- Priyono, Edy (1998), “ Penuntasan Program Wajib Belajar 9 Tahun : Masalah dan Usulan Kebijakan”, ***Warta Demografi***, th. 28 No. 4, 1998
- Simanjuntak, Payaman J. 1998, ***Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia***, Edisii 2001, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, Jakarta.
- Tjiptoherijanto, Prijono. 2003. Upah, ***Jaminan Sosial Dan Perlindungan Anak***. Jakarta:Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

